

Dinamika Kependudukan dan Ketenagakerjaan: Tantangan dan Kebijakan Berkelanjutan untuk Indonesia

Robi Sagara¹, Ahmad Hapsak Setiawan², Almuzafir³, Endar Purnawan⁴
^{1,2,3,4} Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambah
e-mail: hapsakiwan@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-02-2025

Direvisi:
18-02-2025

Diterima:
20-02-2025

Keywords

: *Population, Employment, Sustainable Policy, Vocational Education, Urbanization*

ABSTRACT

This study examines population dynamics and employment in Indonesia, along with the challenges in formulating sustainable policies. Using a qualitative method with a literature review approach, this research analyzes various documents from BPS, Bappenas, previous studies, and other sources that explore population and employment issues. The findings indicate that Indonesia needs to strengthen investment in vocational education, develop sustainable urbanization policies, and encourage the transition of the informal sector to the formal economy. Additionally, creating elderly-friendly cities and expanding social security are essential to improving societal well-being. The success of these policies largely depends on the synergy between the government, the private sector, and civil society in fostering inclusive development programs. This study contributes to policy recommendations for addressing population and employment challenges in Indonesia. However, its limitation lies in the general scope of data, suggesting that future research should conduct empirical studies based on regional data to assess policy effectiveness more specifically.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen dari BPS, Bappenas, hasil penelitian, dan sumber lain yang mengkaji aspek kependudukan dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat investasi dalam pendidikan vokasional, mengembangkan kebijakan urbanisasi yang berkelanjutan, serta mendorong transformasi sektor informal ke sektor formal. Selain itu, diperlukan pembangunan kota yang ramah lansia dan perluasan jaminan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan program pembangunan yang inklusif. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk menghadapi tantangan kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data yang masih bersifat umum, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris berbasis data regional guna memahami efektivitas kebijakan secara lebih spesifik.

Kata Kunci

: *Kependudukan, Ketenagakerjaan, Kebijakan Berkelanjutan, Pendidikan Vokasional, Urbanisasi*

Corresponding Author

: Ahmad Hapsak Setiawan, e-mail: hapsakiwan@gmail.com

PENDAHULUAN

Dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan merupakan isu strategis yang tak terpisahkan dari proses pembangunan nasional, terutama di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Dengan proyeksi jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 319 juta pada tahun 2045, Indonesia menghadapi kompleksitas permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kebijakan (Bappenas, 2023). Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk usia produktif dan ketersediaan lapangan kerja dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, seperti peningkatan angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan (Adriyanto et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang holistik dalam pengelolaan tenaga kerja, pendidikan, dan investasi untuk memastikan bonus demografi dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu negara penyumbang terbesar pertumbuhan populasi dunia, Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus tantangan besar dalam memastikan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar tidak menjadi beban, tetapi justru menjadi peluang pembangunan. "Bonus demografi," istilah yang mengacu pada masa ketika rasio ketergantungan berada pada titik terendah, menghadirkan "window of opportunity" antara tahun 2020-2035. Jika dikelola dengan baik, periode ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Muhyiddin et al., 2020; Tjiptoherijanto, 2017). Tanpa strategi yang tepat, bonus demografi justru berisiko menjadi door to disaster yang memperburuk persoalan sosial-ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan (Hasanah & Armanda, 2021; Permatasari, 2018). Oleh karena itu, optimalisasi bonus demografi melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengubah tantangan kependudukan menjadi peluang emas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya memperkuat perekonomian Indonesia, berbagai kebijakan telah dirumuskan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial. Penguatan pendidikan vokasional, misalnya, memerlukan sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah, tetapi sering kali terjadi ketidaksesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Urbanisasi berkelanjutan juga menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, kepentingan politik, serta resistensi masyarakat terhadap perubahan tata kota yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Selain itu, upaya mendorong sektor informal untuk bertransformasi menjadi sektor formal tidak hanya bergantung pada insentif fiskal, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur bisnis yang merata di seluruh daerah. Tantangan lain muncul dalam pembangunan kota ramah lansia, di mana penyediaan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial harus diimbangi dengan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga menghadapi permasalahan dalam memastikan partisipasi yang merata dan manfaat yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut serta menawarkan solusi berbasis bukti yang dapat diadaptasi dalam berbagai kondisi lokal guna mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa kajian terdahulu mengenai dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia umumnya fokus pada isu-isu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, serta kebijakan ketenagakerjaan yang lebih sempit. Misalnya, penelitian oleh Hidayati (2021) meneliti pengaruh urbanisasi terhadap ketenagakerjaan di kota-kota besar (Hidayati, 2021), sementara studi oleh Wulandari dan Anggraini (2020) mengkaji tantangan sektor informal dalam transisi menuju formalitas Kawasan ruang perkotaan (Wp, 2019). Namun, kajian-kajian tersebut belum

membahas secara komprehensif hubungan antara kebijakan pendidikan vokasional, urbanisasi berkelanjutan, dan transformasi sektor informal dalam konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan holistiknya yang menggabungkan kebijakan-kebijakan tersebut dengan analisis berbasis data kependudukan dan ketenagakerjaan dari sumber-sumber resmi seperti BPS dan Bappenas, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan pendidikan vokasional, perencanaan urbanisasi yang berkelanjutan, serta kebijakan yang responsif terhadap populasi lansia. Pertanyaan utama yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja tantangan dalam dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia? (2) Bagaimana strategi dan kebijakan keberlanjutan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan? Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan rekomendasi berbasis literatur bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pembangunan agar dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga investasi dalam sumber daya manusia dan tata ruang dapat mendukung kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai dokumen, termasuk laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen lain yang membahas isu kependudukan dan ketenagakerjaan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi berbagai kebijakan dan strategi yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2012). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan merangkum informasi relevan dari berbagai dokumen yang dikaji. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan hubungan antara kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menelaah pola-pola yang muncul dalam data untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna mengatasi tantangan kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Penduduk dan Tenaga Kerja Konteks Global dan Regional

Dinamika penduduk dan tenaga kerja di tingkat global dan regional mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur demografi dan pasar kerja. Secara global, banyak negara berkembang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, yang menyebabkan tingginya permintaan tenaga kerja muda, namun dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi karena kurangnya lapangan kerja yang memadai (Maria, 2021). Sebaliknya, negara-negara maju sering menghadapi tantangan penuaan populasi, yang memicu kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, sehingga meningkatkan ketergantungan pada tenaga kerja migran. Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan bahwa antara sekarang dan 2050, jumlah orang lanjut usia (65 tahun ke atas) akan berlipat ganda di seluruh dunia, dari 700 juta pada 2020

menjadi 1,5 miliar, dengan peningkatan proporsional dari 9% menjadi 16% (INED, 2021). Di tingkat regional, dinamika ini bervariasi, misalnya di Asia Tenggara yang menghadapi migrasi tenaga kerja antarnegara (Migration Data Portal, 2023), atau di Eropa yang bergulat dengan isu integrasi pekerja migran untuk mengatasi defisit tenaga kerja (Oezcan, 2004; Yadav, 2024). Perubahan ini mengarah pada penciptaan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar global yang terus berkembang.

Pada tingkat global, dinamika penduduk dan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti urbanisasi, perubahan struktur umur, dan globalisasi pasar tenaga kerja (Kristiantono & Yuliawati, 2022). Dinamika ini mengharuskan negara-negara berkembang untuk menyusun kebijakan yang adaptif terhadap perubahan struktur penduduk (UNDP, 2012). Urbanisasi, sebagai salah satu tren utama, telah meningkatkan proporsi penduduk perkotaan di Indonesia dari 50% menjadi lebih dari 75% pada tahun 2050 (Tjiptoherijanto, 2017). Kondisi ini memunculkan tantangan baru terkait tata kelola perkotaan, mulai dari kemacetan, kemiskinan, hingga degradasi lingkungan.

B. Tantangan Internal Indonesia

Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi beberapa mega tren kependudukan yang signifikan. Pertumbuhan Penduduk: Tingkat fertilitas dalam beberapa decade terakhir yang masih berada di atas angka ideal (BPS, 2023a; Igustin & Budiantara, 2021) menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini menimbulkan tekanan besar pada sumber daya alam dan lingkungan, seperti peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, deforestasi untuk memenuhi permintaan industri dan pertanian, serta eksploitasi air bersih yang semakin meningkat. Selain itu, tingginya jumlah penduduk juga berkontribusi pada peningkatan emisi karbon akibat konsumsi energi yang lebih besar, serta meningkatnya produksi limbah domestik yang dapat mencemari ekosistem. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan kependudukan yang efektif dan pembangunan berkelanjutan, lonjakan jumlah penduduk ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun pertumbuhan penduduk yang tinggi sering dikaitkan dengan potensi ekonomi melalui peningkatan tenaga kerja dan konsumsi domestik, dampak negatifnya tidak bisa diabaikan. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya, tekanan terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya angka pengangguran akibat ketidakseimbangan antara penciptaan lapangan kerja dan jumlah angkatan kerja menjadi tantangan serius. Selain itu, dalam konteks lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem, sementara urbanisasi yang tidak terkendali berisiko memicu permasalahan sosial, seperti kemacetan, pemukiman kumuh, dan peningkatan kriminalitas. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan harus diarahkan pada pengendalian angka fertilitas melalui program keluarga berencana yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, serta perencanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2030 menciptakan peluang emas bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas nasional (Tjiptoherijanto, 2017). Namun, tantangan besar adalah memastikan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai. Data dari Bappenas (2022) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal keterampilan dan daya saing, dengan 57% tenaga kerja masih berpendidikan setingkat SMP atau lebih rendah. Selain itu, ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan vokasi di berbagai wilayah menyebabkan rendahnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi

era industri 4.0. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan strategis seperti peningkatan investasi dalam sektor pendidikan, penguatan program pelatihan berbasis keterampilan, serta penciptaan ekosistem kerja yang inovatif dan inklusif, potensi bonus demografi dapat berubah menjadi beban demografi akibat meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar global.

Setelah tahun 2030, Indonesia akan memasuki era populasi lanjut usia, dengan jumlah lansia yang diperkirakan mencapai 80 juta pada tahun 2050, atau sekitar 25% dari total populasi (BPS, 2023). Lonjakan jumlah lansia ini menuntut kebijakan yang komprehensif untuk memastikan kesejahteraan mereka, termasuk pembangunan "kota ramah lansia" yang dilengkapi dengan infrastruktur aksesibilitas, fasilitas kesehatan yang memadai, serta layanan transportasi publik yang aman dan nyaman (Tjiptoherijanto, 2017). Selain itu, program jaminan sosial yang berkelanjutan, seperti perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan reformasi sistem pensiun, menjadi kunci dalam menjamin keberlanjutan ekonomi para lansia. Data dari Kementerian Keuangan (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% lansia di Indonesia yang memiliki jaminan pensiun yang mencukupi, sehingga berisiko meningkatkan angka ketergantungan ekonomi terhadap generasi produktif. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, pergeseran struktur demografi ini dapat membebani sistem ekonomi dan kesehatan nasional, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta memperburuk ketimpangan kesejahteraan di masa depan.

Selain itu, fenomena penuaan penduduk di Indonesia tidak hanya menuntut kebijakan jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Dengan rasio ketergantungan lansia yang terus meningkat, ada risiko terjadinya beban ganda demografi, di mana generasi produktif tidak hanya harus menopang perekonomian nasional tetapi juga membiayai kebutuhan hidup lansia yang semakin besar (BPS, 2023b). Kesenjangan dalam sistem perlindungan sosial juga menjadi tantangan serius, mengingat sebagian besar tenaga kerja informal di Indonesia—sekitar 59,1% pada 2023 (BPS, 2023)—tidak memiliki jaminan pensiun yang layak. Selain itu, infrastruktur layanan kesehatan masih belum siap menghadapi lonjakan permintaan perawatan lansia, terutama di daerah terpencil yang minim fasilitas medis dan tenaga kesehatan geriatri. Jika pemerintah tidak segera merancang kebijakan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan, Indonesia dapat menghadapi stagnasi ekonomi akibat menurunnya produktivitas dan meningkatnya pengeluaran negara untuk subsidi sosial, seperti yang terjadi di beberapa negara dengan populasi menua seperti Jepang dan Korea Selatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem yang mendukung kesejahteraan lansia, termasuk penguatan ekonomi berbasis lansia (*silver economy*) dan peningkatan keterlibatan lansia dalam aktivitas sosial serta ekonomi.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan kependudukan yang kompleks seiring dengan perubahan struktur demografi yang signifikan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat tingkat fertilitas yang masih berada di atas angka ideal menimbulkan tekanan besar terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Lonjakan kebutuhan lahan untuk pemukiman, eksploitasi air bersih, serta peningkatan emisi karbon akibat konsumsi energi yang lebih besar menjadi konsekuensi yang harus segera diatasi. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan kependudukan yang efektif, masalah ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, Indonesia tengah memasuki fase bonus demografi, dengan proporsi penduduk usia produktif yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Fase ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, tantangan

utamanya adalah memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang memadai. Data menunjukkan bahwa 57% tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan setingkat SMP atau lebih rendah, yang menunjukkan rendahnya kesiapan dalam menghadapi persaingan global. Jika tidak diantisipasi dengan investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, bonus demografi ini dapat berubah menjadi beban demografi akibat meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya daya saing tenaga kerja.

Setelah melewati puncak bonus demografi, Indonesia akan memasuki era populasi lanjut usia pada tahun 2030, dengan jumlah lansia yang diperkirakan mencapai 80 juta jiwa pada 2050. Hal ini menuntut kebijakan yang komprehensif dalam sistem jaminan sosial dan kesehatan. Ketimpangan dalam sistem perlindungan sosial semakin memperburuk kondisi, mengingat sekitar 59,1% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal dan tidak memiliki jaminan pensiun yang layak. Jika tidak ada reformasi dalam sistem pensiun dan kesehatan, peningkatan jumlah lansia dapat menjadi beban ekonomi yang besar, seperti yang telah dialami negara-negara dengan populasi menua seperti Jepang dan Korea Selatan.

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan yang mencakup pengendalian angka kelahiran, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi jaminan sosial bagi lansia. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem yang mendukung kesejahteraan lansia melalui pendekatan ekonomi berbasis lansia (*silver economy*). Dengan perencanaan yang matang, Indonesia dapat mengoptimalkan transisi demografis ini agar tetap menjadi kekuatan ekonomi yang kompetitif di masa depan.

C. Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Dinamika kependudukan Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat fertilitas, angka harapan hidup, dan urbanisasi, menghadirkan tantangan signifikan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Meskipun telah terjadi penurunan signifikan dalam TFR dibandingkan beberapa dekade lalu, tingkat kelahiran yang masih cukup tinggi berkontribusi pada laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini mempengaruhi struktur usia penduduk, dengan proporsi usia produktif yang terus meningkat, sementara proporsi penduduk lansia juga mulai menunjukkan tren kenaikan (BPS, 2023b). Dengan demikian, dinamika kependudukan Indonesia yang terus berkembang memerlukan perencanaan yang matang dalam mengelola sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan demografi.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tantangan dalam bidang ketenagakerjaan semakin kompleks. Angka pengangguran di Indonesia, meskipun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, masih menjadi isu utama, terutama di kalangan pemuda dan lulusan pendidikan tinggi. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, yang sering kali menghadapi masalah seperti upah yang rendah, kurangnya jaminan sosial, dan keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kualitas tenaga kerja yang dapat mempengaruhi daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Selain itu, otomatisasi dan digitalisasi di berbagai sektor industri membawa tantangan baru, dimana sebagian besar tenaga kerja yang ada mungkin tidak memiliki keterampilan yang sesuai untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, kebijakan berkelanjutan dalam bidang ketenagakerjaan dan kependudukan sangat diperlukan. Penguatan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk melalui program vokasi dan peningkatan literasi digital,

menjadi kunci untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan pasar kerja global. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan jaminan sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi tenaga kerja dari kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, kebijakan yang mendukung penyediaan lapangan pekerjaan formal dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih ramah lingkungan, seperti ekonomi hijau, dapat membantu menciptakan peluang kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia sangat krusial untuk menghadapi tantangan dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkembang pesat. Dengan populasi usia produktif yang besar, Indonesia memiliki peluang besar dalam bonus demografi, namun hal ini hanya dapat dimanfaatkan jika SDM yang ada memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan industri. Tanpa peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan yang lebih baik, pelatihan keterampilan, dan literasi digital, Indonesia berisiko menghadapi pengangguran struktural, ketimpangan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis pada kebutuhan pasar kerja sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif, adaptif terhadap teknologi, dan mampu bersaing di pasar global, sekaligus mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial.

D. Kebijakan Strategis

Untuk menghadapi tantangan kependudukan yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga perencanaan tata kota yang efektif. Tanpa strategi yang komprehensif, lonjakan jumlah penduduk, perubahan struktur demografi, serta dampak sosial-ekonomi yang menyertainya dapat menjadi ancaman bagi pertumbuhan dan kesejahteraan nasional.

1. Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi kunci dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Saat ini, masih terdapat ketimpangan dalam akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, serta rendahnya partisipasi pendidikan kejuruan yang dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Data dari Bappenas (2022) menunjukkan bahwa 57% tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan setingkat SMP atau lebih rendah, yang menghambat daya saing dalam pasar kerja global. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menjadi langkah strategis.

Selain pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, juga berperan penting dalam mengendalikan tingkat fertilitas dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penurunan angka stunting dan peningkatan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Tanpa kebijakan kesehatan yang kuat, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan memperburuk ketimpangan sosial.

2. Peningkatan Peluang Kerja dan Penguatan Ketenagakerjaan

Kebijakan ketenagakerjaan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas serta pengembangan kewirausahaan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor informal. Saat ini, sekitar 59,1% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal (BPS, 2023), yang menunjukkan tingginya ketidakpastian dalam pendapatan dan kesejahteraan pekerja. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat kebijakan industri yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, mendorong

digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mempercepat adopsi teknologi dalam sektor industri guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Jika kebijakan ini tidak segera diterapkan, Indonesia berisiko menghadapi **beban demografi** di mana peningkatan jumlah angkatan kerja tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat memicu pengangguran dan ketimpangan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri perlu diperkuat agar lulusan pendidikan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Perencanaan Perkotaan yang Berkelanjutan

Urbanisasi yang pesat di Indonesia harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Saat ini, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengalami masalah serius terkait kemacetan, permukiman kumuh, dan polusi akibat perencanaan tata kota yang tidak optimal. Jika tren urbanisasi ini terus meningkat tanpa strategi mitigasi yang efektif, tekanan terhadap infrastruktur kota akan semakin besar, yang berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan perumahan yang terjangkau, memperkuat sistem transportasi publik, serta memastikan ketersediaan ruang hijau untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni. Selain itu, desentralisasi ekonomi perlu dipercepat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah selain kota metropolitan agar tidak terjadi konsentrasi penduduk di wilayah tertentu.

4. Kebijakan untuk Lansia dan Sistem Jaminan Sosial

Dengan proyeksi 80 juta lansia pada tahun 2050 (BPS, 2023), Indonesia harus mempersiapkan sistem jaminan sosial yang komprehensif serta membangun kota yang ramah lansia. Saat ini, hanya sekitar 10% lansia yang memiliki jaminan pensiun yang mencukupi (Kementerian Keuangan, 2022), yang menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan sosial bagi kelompok usia lanjut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memperkuat sistem pensiun bagi pekerja formal dan informal, serta mendorong keterlibatan lansia dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas lansia, seperti fasilitas kesehatan khusus geriatri, transportasi yang ramah lansia, serta program kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, harus menjadi prioritas.

Jika kebijakan ini tidak segera diterapkan, meningkatnya jumlah lansia dapat menjadi beban ekonomi yang besar, memperlambat pertumbuhan nasional, serta meningkatkan angka ketergantungan. Studi dari negara-negara dengan populasi menua seperti Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa tanpa sistem perlindungan sosial yang kuat, populasi lansia dapat menghambat dinamika ekonomi dan menciptakan ketimpangan sosial yang lebih luas.

Indonesia berada di persimpangan jalan dalam menghadapi mega tren kependudukan. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi dapat menjadi peluang emas bagi pertumbuhan ekonomi, sementara transisi menuju populasi menua dapat diantisipasi melalui kebijakan sosial yang tepat. Namun, tanpa intervensi kebijakan yang kuat, negara ini berisiko menghadapi stagnasi ekonomi, ketimpangan sosial, serta beban demografi yang semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan kependudukan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan kesejahteraan nasional dalam jangka panjang.

E. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di atas, berikut adalah rekomendasi utama:

1. Memperkuat investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional.

Diperlukan penguatan pendidikan berbasis keterampilan melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta. Program sertifikasi kerja serta akses ke pelatihan berbasis teknologi harus diperluas ke seluruh wilayah, termasuk daerah pedalaman. Penguatan pendidikan berbasis keterampilan memerlukan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta agar lebih efektif dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Program sertifikasi dan pelatihan berbasis teknologi harus diperluas secara merata, termasuk ke daerah pedalaman, untuk mengatasi kesenjangan akses dan memastikan peningkatan daya saing tenaga kerja secara inklusif. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta mempercepat adaptasi terhadap kebutuhan industri di era digital.

2. Mengembangkan kebijakan urbanisasi yang berkelanjutan.

Kebijakan tata kota harus mengintegrasikan aspek transportasi massal, pengelolaan limbah, dan akses energi terbarukan. Perencanaan kota harus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meningkatkan akses terhadap ruang terbuka hijau untuk menunjang kualitas hidup masyarakat urban. Integrasi transportasi massal, pengelolaan limbah, dan energi terbarukan dalam kebijakan tata kota merupakan langkah strategis untuk menciptakan kota berkelanjutan. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi yang sering kali terbentur oleh kepentingan politik, keterbatasan anggaran, dan resistensi masyarakat terhadap perubahan. Mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi memerlukan infrastruktur transportasi publik yang efisien dan terjangkau, sementara peningkatan ruang hijau harus diimbangi dengan kebijakan penggunaan lahan yang tidak mengorbankan kebutuhan perumahan dan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

3. Mendukung transformasi sektor informal ke sektor formal.

Pemerintah harus menciptakan kebijakan insentif bagi usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan diri secara formal. Dukungan fiskal, seperti pengurangan pajak, dapat diberikan kepada UKM yang berhasil memenuhi standar formalitas. Kebijakan insentif bagi usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan diri secara formal merupakan langkah positif dalam meningkatkan kontribusi sektor informal terhadap perekonomian. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada kemudahan proses registrasi dan kepastian manfaat yang diperoleh UKM setelah menjadi entitas formal. Pengurangan pajak sebagai insentif dapat mendorong kepatuhan, tetapi tanpa dukungan infrastruktur bisnis yang memadai—seperti akses permodalan, pasar, dan pelatihan manajerial—UKM tetap rentan terhadap persaingan dan kegagalan usaha. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diiringi dengan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada formalitas administratif, tetapi juga pada keberlanjutan dan daya saing UKM dalam jangka panjang.

4. Membangun kota yang ramah lansia dan memperluas jaminan sosial.

Penyediaan fasilitas kesehatan khusus lansia dan perumahan yang terjangkau harus menjadi prioritas dalam pembangunan kota. Di samping itu, pengembangan program literasi keuangan bagi kelompok lansia dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Penyediaan fasilitas kesehatan dan perumahan terjangkau bagi lansia merupakan langkah penting dalam menciptakan kota yang inklusif, namun tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran serta ketimpangan distribusi infrastruktur di berbagai wilayah. Sementara itu, literasi keuangan bagi lansia memang dapat meningkatkan kemandirian

ekonomi, tetapi efektivitasnya bergantung pada faktor lain seperti kondisi kesehatan, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta dukungan sosial. Selain itu, tidak semua lansia memiliki kapasitas untuk mengelola keuangan secara mandiri, terutama bagi mereka yang mengalami penurunan kognitif atau tidak memiliki jaringan dukungan keluarga yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dikombinasikan dengan sistem perlindungan sosial yang kuat agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan lansia.

5. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan yang inklusif.

Kerja sama ini diperlukan untuk menciptakan program-program berkelanjutan yang mendukung inklusi sosial dan keberlanjutan ekonomi. Misalnya, inisiatif pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang dapat memperkuat kohesi sosial di berbagai daerah. Kerja sama dalam menciptakan program berkelanjutan untuk inklusi sosial dan keberlanjutan ekonomi memang penting, tetapi keberhasilannya bergantung pada sejauh mana program tersebut dapat diadaptasi dengan kondisi lokal. Inisiatif pembangunan ekonomi berbasis komunitas berpotensi memperkuat kohesi sosial, namun tanpa dukungan kebijakan yang konsisten dan sumber daya yang memadai, program ini bisa menjadi tidak efektif atau hanya berdampak jangka pendek. Selain itu, adanya potensi kesenjangan dalam partisipasi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, perlu diantisipasi agar program benar-benar inklusif dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak dalam komunitas tersebut.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian Indonesia dengan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasional, misalnya, akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan industri di era digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas nasional, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran dan ketimpangan ekonomi, terutama di daerah pedalaman. Selain itu, urbanisasi yang berkelanjutan akan mendorong efisiensi dalam mobilitas masyarakat dan pemanfaatan sumber daya, yang pada akhirnya dapat menekan biaya ekonomi akibat kemacetan, polusi, dan degradasi lingkungan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan merata.

Di sisi lain, transformasi sektor informal ke sektor formal serta pembangunan kota yang ramah lansia akan memperluas basis ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan semakin banyaknya usaha mikro dan kecil yang terdorong untuk masuk ke dalam sektor formal, pendapatan negara dari pajak juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat dialokasikan kembali untuk program sosial dan infrastruktur. Selain itu, jaminan sosial bagi lansia akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil, di mana kelompok usia tua tidak menjadi beban ekonomi tetapi tetap memiliki daya beli dan peran aktif dalam perekonomian. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Oleh karena itu, jika diterapkan secara konsisten dan dengan dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan-kebijakan ini akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan pentingnya kebijakan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Investasi dalam pendidikan vokasional, kebijakan urbanisasi yang ramah lingkungan, serta dukungan bagi sektor informal menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan inklusi ekonomi. Selain itu, pembangunan kota yang ramah lansia dan perluasan jaminan sosial diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil guna memastikan implementasi yang efektif dan berdampak jangka panjang.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan data yang masih terbatas pada analisis kebijakan secara umum tanpa eksplorasi mendalam terhadap variasi kondisi di setiap daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini belum secara spesifik mengukur dampak implementasi kebijakan yang telah ada terhadap dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan studi empiris berbasis data regional guna memahami bagaimana efektivitas kebijakan berbeda di berbagai wilayah. Selain itu, analisis komparatif dengan negara lain yang menghadapi tantangan serupa dapat memberikan wawasan tambahan dalam merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL*, 11(2), 66–82. <https://doi.org/10.35724/jies.v11i2.2965>
- Bappenas. (2023). *KLHS RPJPN 2025-2045*. Bappenas. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-KLHS-RPJPN-Tahun-2025-2045.pdf>
- BPS. (2023a). *Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) Menurut Provinsi, 1971-2020—Tabel Statistik—Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMCMx/angka-kelahiran-total---total-fertility-rate--tfr--menurut-provinsi--1971-2020.html>
- BPS. (2023b). *STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/5d308763ac29278dd5860fad/statistik-penduduk-lanjut-usia-2023.html>
- Hasanah, U. H., & Armanda, D. (2021). Analisis Dampak Bonus Demografi Terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Aceh. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 7(2), 55–66. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.68>
- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 212–221. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517>
- Igustin, E. D., & Budiantara, I. N. (2021). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Total Fertility Rate di Indonesia Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline Truncated. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v9i2.56791>
- INED. (2021, September 15). *Population aging is accelerating in France and most developed countries—Press centre*. Ined - Institut National d'études Démographiques. <https://www.ined.fr/en/news/press/le-vieillissement-de-la-population-sE28099accelere-en-france-et-dans-la-plupart-des-pays-developpes/>
- Kristriantono, P., & Yuliatwati, Y. (2022). Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.20956/jsep.v18i2.20069>
- Maria, I. (2021). PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KETERSEDIAAN AIR. *Scientific Of Environmental Health and Diseases (e-SEHAD)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/esehad.v2i2.16918>
- Migration Data Portal. (2023, May 31). *Migration Data in South-Eastern Asia*. Migration Data Portal. <https://www.migrationdataportal.org/regional-data-overview/south-eastern-asia>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhyiddin, -Nurlina T., Miskiyah, N., Adriani, D., Ridho, S. L. Z., Novriady, D., Melita, D., & Lupikawati, M. (2020). *SDM dalam Berbagai Perspektif*. Idea Press. <https://repository.unsri.ac.id/73774/1/BUKU%20SDM%20DALAM%20BERBAGAI%20PERSPEKTIF%20Oke%20fiks.pdf>
- Oezcan, V. (2004, July 1). *Germany: Immigration in Transition*. migrationpolicy.org. <https://www.migrationpolicy.org/article/germany-immigration-transition>
- Permatasari, I. D. (2018). DEMOGRAPHIC BONUS IN EAST JAVA: BLESSING OR DISASTER? *East Java Economic Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v2i1.14>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Tjiptoherijanto, P. (2017). DINAMIKA KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.37145/jak.v1i2.67>
- UNDP. (2012). *Realizing the Future We Want for All*. <https://www.undp.org/publications/realizing-future-we-want-all>
- Wp, A. A. G. S. (2019). TANTANGAN DAN PELUANG SEKTOR INFORMAL DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN. *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 2, 598–606.
- Yadav, P. (2024, April 22). *Germany targeting Indian students to address labor shortages – DW – 04/22/2024*. dw.com. <https://www.dw.com/en/germany-targeting-indian-students-to-address-labor-shortages/a-68890502>